

EVALUASI DAMPAK
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMP N)
DI KECAMATAN BANYUMANIK, KOTA SEMARANG

Oleh:
Dona Lika Indriyana, Kismartini, Aufarul Marom

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Profesor Haji Soedarto, S. H., Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

BOS program is education program from government for poor society to facing the mark-up price of gasoline on 2005. Basically, BOS is non-personal operating fund supplying program from government to access nine years elementary school of national educational system. This research, will observe how far BOS Program that almost ten years works, can give benefit and impact for the targets. Qualitative – descriptive method will used to explain the impact evaluation research by in-depth interview. The results of impact evaluation of School Operational Assistance Program (Program BOS) on junior high school grade in Banyumanik Sub district, Semarang City conclude that the targets give positive effects, despite there are some problems about fund managing. Positive effect not only for the pupils and schools, but also for the parents of pupil in there. Impacts for the pupils are motivation to study, because there isn't pay to fee and increasing the instruments for study and extracurricular activities. So that, they optimist to steps on next grade after junior high school. Impacts for parents are helping them about school fee, and then parents can fulfilled another requirement that can support their child education. Impacts for the schools are can completely the school requirements for educational activities. The schools applying and managing of the BOS funds following by the BOS rules that regulate about the fee components up to the prohibitions. Over all, BOS program earns good response for decrease the school fees and support school activities. Until now, BOS program can push down the drop out cases in nine years elementary school grade. But, the school has other problems, like the funds was delayed to transfer and limited to accomplish the school requirements.

Keywords: *School Operational Assistance (BOS), individual impacts, organization impacts, responses*

A. Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan hak setiap warga negara yang diperhatikan pemerintah melalui jenjang pendidikan dasar yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal pemenuhan pemerataan pendidikan adalah melalui kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Namun, adanya permasalahan pendidikan tingkat pendidikan dasar, mengenai kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Upaya pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan yang merata demi terselenggaranya pendidikan dasar yang terjangkau dan berkualitas, salah satunya melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu program pemerintah

untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi seluruh siswa satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Penyediaan BOS di jenjang pendidikan dasar digunakan untuk mendukung penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Program BOS dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menekan angka putus sekolah dan menurunkan angka tidak melanjutkan, serta dapat meringankan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan untuk meringankan beban bagi siswa lain.

Pada tahun 2008, tesis Abdul Kadir Karding (<http://eprints.undip.ac.id>, diunduh pada 24 November 2013), tentang evaluasi pelaksanaan program BOS SMPN di Kota Semarang, menyebutkan bahwa potensi BOS belum menjangkau semua siswa miskin atau tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan secara memadai.

Kondisi pendidikan jenjang pendidikan dasar di Kota Semarang masih ditemukannya fenomena putus sekolah. Pelayanan pendidikan di Kota Semarang menjadi salah satu fokus

pelaksanaan pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Permasalahan yang masih ada pada bidang pendidikan di Kota Semarang adalah mengenai anak-anak yang tergolong dalam usia pendidikan

dasar di Kota Semarang tidak lagi melanjutkan sekolah di jenjang berikutnya. Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi salah satu aspek yang menyumbang masih tingginya angka putus sekolah tingkat SMP di Kota Semarang.

Tabel 1.1
Angka Putus Sekolah Tingkat SMP di Kota Semarang

No	Kecamatan	SMP		
		2012	2013	2014
1	Mijen	0,67	0,37	0,52
2	Gunungpati	0,00	0,06	0,03
3	Banyumanik	0,20	0,12	0,16
4	Gajahmungkur	0,00	0,00	0,00
5	Semarang Selatan	0,09	0,03	0,06
6	Candisari	0,06	0,00	0,03
7	Tembalang	0,04	0,16	0,10
8	Pedurungan	0,12	0,00	0,06
9	Genuk	0,41	0,65	0,53
10	Gayamsari	0,00	0,06	0,03
11	Semarang Timur	0,40	0,04	0,22
12	Semarang Tengah	0,05	0,15	0,10
13	Semarang Utara	0,45	0,46	0,46
14	Semarang Barat	0,16	0,07	0,11
15	Tugu	0,00	0,00	0,00
16	Ngaliyan	0,00	0,00	0,00
Kota Semarang		0,17	0,14	0,15

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang

Namun, disisi lain dengan adanya program BOS, kondisi pendidikan di Kota Semarang sudah cukup baik, melalui keikutsertaan masyarakat dalam upaya melanjutkan pendidikan di tingkat SMP. Dimana indikator keberhasilan program BOS yaitu meningkatnya Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisi Murni (APM). Dalam hal ini, masyarakat Kota Semarang sudah cukup peduli dengan kebutuhan pendidikan SMP, namun patisipasi murni belum mampu untuk mencapai target 100% dalam pencapaian pendidikan dasar untuk semua.

Tabel 1.2
 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisi Murni (APM) Jenjang SMP
 di Kota Semarang

Tahun	APK SMP	APM SMP
2009	99,33%	69,19%
2010	101,73%	77,65%
2011	95,16%	71,55%
2012	96,93%	76,36%
2013	111,31%	79, 31%
2014	113,23%	83, 89%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang

Selanjutnya, lokasi penelitian akan berfokus pada daerah Kecamatan Banyumanik, karena masih ditemukannya angka putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama sejumlah 20% pada tahun 2012, 12% pada tahun 2013, 16% pada tahun 2014.

Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan mengevaluasi dampak individu dan dampak organisasi bagi penerima program BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N) di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Berdasarkan fenomena dampak tersebut akan memunculkan sikap respon penerima mengenai program BOS yang telah berlangsung selama ini.

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek, informasi dan hasil analisis. Menurut Dwiyanto Indiahono (2009: 145), evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan

berdasarkan indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan.

Dalam evaluasi kebijakan akan terlihat apakah kebijakan publik ada hasilnya dan dampak yang dihasilkan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum.

Evaluasi dampak adalah penilaian terhadap perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran dan sejauh mana akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*). Akibat yang dihasilkan adalah apakah akibat tersebut mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effects*). Sehingga disebutkan unsur penting dalam evaluasi kebijakan (Ekowati, 2009: 98).

Unit – unit sosial pedampak merupakan kelompok – kelompok yang akan merasakan dampak dari adanya suatu kebijakan. Kelompok yang tergolong dalam unit – unit sosial mencakup individu,

organisasi, masyarakat, dan lembaga serta sistem sosial. Dampak kebijakan terhadap individu akan merembet pada kelompok, dan begitu pula sebaliknya dampak yang langsung mengenai suatu organisasi dapat merembet pada individu. Jadi, dampak kebijakan dapat berlangsung secara sekuensial maupun resiprokal, yang keduanya bersifat akumulatif (Wibawa, 1994: 53).

Seseorang akan memberikan respon atau daya tanggap terhadap sesuatu yang telah menimpa dirinya. Keberadaan suatu kebijakan juga tentu akan menimbulkan respon terhadap individu, misalnya tentang ketidakpercayaan akan apa yang akan dicapai oleh kebijakan tersebut (skeptis), kritis (mempertanyakan dukungan dan hambatan bagi pelaksanaannya) dan analitis (memberikan sumbang saran bagi pelaksanaan yang lebih baik). (Wibawa, 1994: 60)

Dalam penelitian ini akan mengamati dampak program BOS melalui evaluasi *single program after – only*. Evaluasi *single program after – only* merupakan evaluasi yang dilakukan dengan membuat penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program dengan mengamati terjadinya dampak terhadap sasaran.

B. Metode

Metode penelitian dipilih tipe kualitatif deskriptif, merupakan pendekatan kualitatif yang menempatkan penelitian pada kondisi alamiah yang terjadi di tempat penelitian dan dijabarkan dalam bentuk deskriptif yang mampu menggambarkan dampak program BOS bagi siswa/siswi yang menempuh pendidikan ditingkat SMP Negeri.

Pihak subyek penelitian merupakan individu atau kelompok yang mampu membantu peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian, yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, orang tua siswa dan siswa peserta didik tingkat SMP Negeri di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan melalui: 1) wawancara dengan menyusun pedoman wawancara (*interview guide*) hingga mengarah pada wawancara secara mendalam (*in-depth interview*); 2) Observasi dengan menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi; dan 3) dokumentasi untuk memperoleh data yang diperoleh dengan melakukan penelusuran data dengan menelaah buku, jurnal, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Kemudian data yang telah dikumpulkan dilakukan analisis data yang bersifat kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh melalui reduksi data (pemilihan data), penyajian data, teknik analisis evaluasi, dan penarikan kesimpulan.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian akan memaparkan mengenai analisis tentang penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada informan – informan yang dituju serta mengkaji dokumen – dokumen terkait tentang fokus pada evaluasi dampak program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP Negeri) di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Berdasarkan data – data yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan menganalisis melalui studi pustaka terhadap dokumen yang terkait dengan fokus penelitian yang dilakukan.

Keberadaan program BOS tingkat SMP Negeri di Kecamatan Banyumanik memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan dan pengelolaan program BOS di sekolah masing – masing. Sehingga sebelum pelaksanaan program dimulai, maka perlunya pemahaman pihak – pihak sekolah mengenai program BOS. Secara keseluruhan, pihak sekolah yang

bersangkutan, telah memahami program BOS sesuai dengan buku pedoman petunjuk teknis BOS. Dimana berdasarkan buku pedoman petunjuk teknis BOS Tahun 2015.

Komponen Pembiayaan Dana BOS Untuk Kegiatan – Kegiatan Penunjang Bagi Siswa:

- a). Pengembangan perpustakaan
- b). Penerimaan peserta didik baru
- c). Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
- d). Kegiatan ulangan dan ujian
- e). Kegiatan pembelian bahan habis pakai
- f). Kegiatan langganan daya dan jasa
- g). Kegiatan perawatan sekolah
- h). Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer
- i). Kegiatan pengembangan profesi guru
- j). Membantu peserta didik miskin
- k). Pembiayaan pengelolaan BOS
- l). Pembelian dan perawatan perangkat komputer.

Adanya program BOS, diharapkan mampu memenuhi semua kebutuhan kegiatan sekolah dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan di tingkat SMP. Terlebih lagi saat ini sudah tidak diperbolehkannya lagi sekolah untuk menarik biaya dari orangtua siswa dalam

penyelenggaraan pendidikan. Dana dari program BOS merupakan sumber pendanaan bagi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan penunjang bagi kegiatan – kegiatan sekolah.

Kemudahan untuk bersekolah gratis dengan adanya program BOS, menjadikan siswa/siswi optimis untuk terus dapat melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Selain itu, alasan mereka bahwa adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan, jika hanya memiliki pendidikan terakhir setingkat SMP. Hal tersebut pula yang menjadikan mereka termotivasi untuk tidak putus sekolah serta memiliki harapan dan keyakinan untuk dapat melanjutkan sekolah di tingkat selanjutnya. Selain itu, kegiatan – kegiatan siswa/siswi di sekolah saat ini pun telah ditunjang dengan adanya sarana dan prasaran yang cukup lengkap.

Dampak bagi orangtua, kini tidak lagi mengeluarkan biaya untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga orangtua dapat mengalokasikan pendapatan atau gaji yang diperolehnya kepada kebutuhan – kebutuhan keluarga lainnya, serta hanya cukup melengkapi kebutuhan – kebutuhan penunjang lainnya untuk mendukung dan melengkapi pendidikan anak di sekolah.

Program BOS yang telah disalurkan pada tahun 2005 hingga saat ini mengalami peningkatan guna memberikan pemerataan pendidikan dasar. Berawal dengan pemberian dana sejumlah Rp 324. 500, 00 per peserta didik per tahun, hingga mencapai Rp 1.000.000, 00 per peserta didik per tahun di tahun 2015.

Tabel 3.1
Besaran Bantuan Dana BOS Tahun
2005 - 2014

Tahun	Jumlah Dana BOS / Peserta Didik / Tahun
2005/2006	Rp 324. 500, 00
2006/2007	Rp 324. 500, 00
2007/2008	Rp 324. 500, 00
2009	Rp 575. 000, 00
2010	Rp 575. 000, 00
2011	Rp 710. 000, 00
2012	Rp 710. 000, 00
2013	Rp 710. 000, 00
2014	Rp 710. 000, 00
2015	Rp 1. 000. 000, 00

Sumber: Buku Petunjuk Teknis BOS

Dampak organisasional program BOS bagi sekolah dapat berupa ketersediaan sarana di SMP Negeri kecamatan banyumanik dapat dikatakan sudah tersedia dengan cukup. Dimana ruangan – ruangan tersebut telah disesuaikan dengan fungsi dan keperluan kegiatan yang semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Namun, kegiatan sekolah yang berlangsung dapat berbeda di setiap masing – masing sekolah. Hal ini dikarenakan, kegiatan yang berlangsung

disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan disesuaikan dengan buku petunjuk teknis program BOS.

Program BOS mampu mempengaruhi prioritas – prioritas tujuan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Prioritas kegiatan dari pendanaan BOS yang diutamakan sekolah adalah berlangsungnya kegiatan pembelajaran siswa, meliputi perolehan materi pembelajaran dengan penyediaan buku – buku pelajaran dan kelengkapan di perpustakaan, kegiatan praktikum – praktikum pendukung, kegiatan perlombaan, kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kesiswaan atau kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Terkait dengan pelaksanaan program BOS di SMP Negeri Kecamatan Banyumanik, dana merupakan salah satu aspek terpenting. Hal ini dikarenakan dana merupakan penunjang kegiatan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan gratis. Kemudian masih terjadinya keterlambatan penyaluran dana BOS ke rekening sekolah. Keterlambatan penyaluran dana BOS ke rekening sekolah dinilai sebagai suatu hal yang wajar. Namun, terkadang keterlambatan tersebut sedikit agak mengganggu berjalannya kegiatan sekolah.

Disisi lain, ada pula permasalahan dan hambatan sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Permasalahan yang dihadapi

sekolah terkait program BOS sangat beragam, hal ini disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing – masing sekolah. Salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah adanya pembatasan pemenuhan kebutuhan sekolah. Sehingga sekolah mengalami keterbatasan untuk melakukan kegiatan – kegiatan sekolah.

Tabel 3.2
Komponen Pembiayaan Dana BOS Untuk Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer

Item Pembiayaan	Penjelasan
1. Membeli desktop/work station	Desktop/worksatati on maksimum 7 unit bagi SMP untuk proses pembelajaran.
2. Membeli printer atau printer plus scanner	Printer 1 unit/tahun
3. Membeli laptop	Laptop 1 unit dengan harga maksimum Rp 6 juta dan dibeli di toko resmi.
4. Membeli proyektor	Proyektor maksimum 2 unit dengan harga tiap unit maksimum Rp 5 juta dan dibeli di toko resmi
*Proses pengadaan barang oleh sekolah harus mengikuti peraturan yang berlaku *Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.	

Sumber: Buku Pedoman Petunjuk Teknis BOS Tahun 2015

Keberadaan program BOS juga berperan pada kondisi angka kelulusan yang diraih oleh SMP Negeri yang bersangkutan yang saat ini telah mencapai kelulusan seratus persen, itu artinya bahwa di sekolah sudah tidak ada lagi angka

putus sekolah. Selain itu, juga tidak ada lagi angka putus sekolah di tingkatan kelas lainnya. Hal yang menonjol dalam angka kelulusan ini adalah meningkatnya nilai rata – rata pencapaian ujian nasional di sekolah yang bersangkutan.

Tabel 3.3
Angka Kelulusan di SMP Negeri Kecamatan Banyumanik Tahun Ajaran 2011 - 2014

Tahun Ajaran		Sekolah			
		SMP N 12	SMP N 21	SMP N 26	SMP N 27
2011/2012	Peserta UN	262 siswa	176 siswa	259 siswa	258 siswa
	Kelulusan	100%	100%	100%	100%
2012/2013	Peserta UN	265 siswa	218 siswa	237 siswa	253 siswa
	Kelulusan	100%	100%	100%	100%
2013/2014	Peserta UN	255 siswa	219 siswa	233 siswa	255 siswa
	Kelulusan	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data SMP N 12, SMP N 21, SMP N 26, SMP N 27

Berlangsungnya program BOS di SMP Negeri Kecamatan Banyumanik, juga tidak terlepas dari saran dan harapan sasaran penerimanya. Adanya harapan sekolah bahwa dana program BOS nantinya akan dapat lebih membantu dan mendukung seluruh kegiatan sekolah, yang tidak seperti sekarang, dimana masih terdapat beberapa batasan dan ketidaksinkronan dengan penyesuaian peraturan daerah yang ada. Selain itu, harapan bahwa program BOS dapat terus mengalami perbaikan dalam setiap tahunnya dan tidak lagi terjadi keterlambatan dalam penyaluran dana ke rekening sekolah.

D. Penutup

Keberadaan program BOS di SMP Negeri Kecamatan Banyumanik dipandang sebagai pembiayaan operasional sekolah dan perlunya pemahaman program melalui adanya kegiatan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang mengenai petunjuk, teknis program BOS.

1. Kesimpulan

Program BOS di SMP Negeri Kecamatan Banyumanik memberikan dampak bagi siswa/siswi dan orangtua siswa yang bersangkutan dalam pemenuhan akses pendidikan dasar. Dampak secara organisasional bagi SMP Negeri Kecamatan Banyumanik,

sekolah dapat melakukan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana kegiatan sekolah melalui pengelolaan dana BOS yang diterima sekolah. Selain itu, dana BOS juga digunakan untuk meningkatkan prestasi sekolah melalui kegiatan – kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan juga untuk menekan angka putus sekolah. Meskipun di beberapa kondisi, sekolah mengalami hambatan dalam pengelolaan dana BOS yang terkadang mengalami keterlambatan penyaluran ke rekening sekolah. Serta, hambatan untuk dapat menyesuaikan dan mencari alternatif lain ketika muncul kebutuhan sekolah yang mendesak, sedangkan adanya pembatasan komponen pembiayaan dalam buku pedoman petunjuk teknis BOS.

2. Saran

Maka, perlunya dukungan antara pihak Dinas Pendidikan Kota Semarang dan SMP Negeri di Kecamatan Banyumanik dalam pelaksanaan dan pemantauan program BOS, sebagai bentuk pendampingan bagi dalam mengatasi permasalahan – permasalahan yang menjadi keterbatasan sekolah dalam mengikuti buku pedoman petunjuk teknis BOS.

Daftar Pustaka

- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2009. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Abdul Kadir Karding. 2008. *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015